



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UPITA YENIZA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 511814

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.970.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
4. Tanah Seluas 373 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/176 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1.098 m2/396 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
8. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA BUKITTINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 246.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 S AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



2. MOTOR, HONDA CB15A1RRF1 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V M/T Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.374.397.861

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.686.397.861

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.686.397.861

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.